

KERJA SAMA *PUBLISH WHAT YOU PAY* (PWYP) INDONESIA DAN *AUSTRALIAN AID* DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP BIDANG TRANSISI ENERGI

Oleh: Amelia Putri Disar Samudera

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Transisi energi merupakan agenda global dalam menghadapi krisis iklim, namun dalam praktiknya, kelompok perempuan sering kali minim terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid* melalui program *We for JET* dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang transisi energi. Fokus penelitian ini mencakup implementasi program di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini berhasil memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal melalui edukasi serta pelatihan analisis kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara PWYP Indonesia dan *Australian Aid* mampu mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) ke dalam tata kelola energi, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi energi masyarakat dan kebijakan nasional yang masih didominasi oleh energi fosil.

Kata Kunci: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Australian Aid, Transisi Energi, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT

Energy transition is a global agenda in addressing the climate crisis; however, in practice, women are often minimally involved in energy policy decision-making processes. This research aims to analyze the cooperation between Publish What You Pay (PWYP) Indonesia and Australian Aid through the We for JET program in promoting women's empowerment within the energy transition sector. The focus of this study includes the implementation of the program in East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara. The findings indicate that this collaboration has successfully strengthened women's leadership capacity at the local level through education and policy analysis training. The study concludes that the synergy between PWYP Indonesia and Australian Aid is capable of integrating Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) principles into energy governance, despite facing challenges such as low community energy literacy and national policies that remain dominated by fossil fuels.

Keywords: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Australian Aid, Energy Transition, Women's Empowerment.

A. PENDAHULUAN

Transisi energi merupakan tantangan global yang semakin mendesak karena seiring meningkatnya dampak perubahan iklim akibat ketergantungan pada energi fosil. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks, terutama bagi kelompok rentan.¹ Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk melakukan transisi energi, yaitu melakukan peralihan menuju energi terbarukan, termasuk Indonesia sebagai bagian dari upaya mitigasi krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Transisi energi tidak semata-mata persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola, kebijakan, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, konsep *just energy transition* menjadi penting karena menekankan bahwa proses peralihan energi harus dilakukan secara adil dan inklusif.² Namun, dalam praktiknya, kelompok perempuan masih sering terpinggirkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan energi. Padahal, perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi di tingkat rumah tangga dan komunitas, serta menjadi kelompok

yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan kebijakan energi yang tidak inklusif.³

Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan peran organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong partisipasi publik dan keadilan dalam transisi energi. *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil global PWYP, menginisiasi program *We for JET (Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition)* yang bertujuan memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan dalam proses transisi energi di Indonesia.⁴ Program ini dilaksanakan melalui advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, serta perluasan ruang partisipasi perempuan di tingkat lokal dan nasional.⁵

Pelaksanaan program *We for JET* tidak terlepas dari dukungan *Australian Aid* sebagai mitra pembangunan internasional. *Australian Aid* mendukung agenda pembangunan inklusif, kesetaraan gender, dan ketahanan iklim melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Kerja sama antara PWYP Indonesia dan *Australian Aid* menjadi bentuk kolaborasi aktor non-negara dalam

¹ Syahrul Sireagar, "Menjaga Napas Bumi: Tantangan Dan Solusi Krisis Air, Kedaulatan Pangan, Dan Energi Di Era Perubahan Iklim," Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024, <https://umj.ac.id/opini/menjaga-napas-bumi-tantangan-dan-solusi-krisis-air-kedaulatan-pangan-dan-energi-di-era-perubahan-iklim/>.

² Publish What You Pay Indonesia, "Introducing You Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)," Publish What You Pay Indonesia, n.d., <https://pwypindonesia.org/en/women-lead-and-benefited-from-a-just-energy-transition-we-for-jet/>.

³ Cindy Hiong, "Krisis Iklim Meningkatkan Risiko Kekerasan Berbasis Gender," bincang perempuan, 2024, <https://bincangperempuan.com/krisis-iklim-meningkatkan-risiko-kekerasan-berbasis-gender/>.

⁴ Publish What You Pay Indonesia, "Profil Organisasi," Publish What You Pay Indonesia, n.d., <https://pwypindonesia.org/id/profil-organisasi/>.

⁵ Publish What You Pay and Indonesia, "Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)," Publish What You Pay Indonesia, accessed May 25, 2025, <https://pwypindonesia.org/en/>.

mendorong transisi energi berbasis gender.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid* dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang transisi energi melalui program *We for JET*.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini berusaha mencari jawaban mengenai bagaimana dampak kerja sama antara *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid* dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang transisi energi melalui program *We for JET* (*Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition*). Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kolaborasi antar-aktor internasional, yakni organisasi masyarakat sipil (CSO) nasional dan lembaga bantuan luar negeri, dapat menghasilkan dampak normatif dan struktural dalam proses transisi energi yang inklusif di Indonesia. Dengan strategi pencarian basis data elektronik, internet, serta seleksi studi melalui analisis dokumen dan wawancara, penulis dapat mencapai kesimpulan yang pasti.

Menurut Bagong Suyanto dan Satinah, penelitian kualitatif sebagaimana diartikan merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan

dan tulisan serta perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti.⁷

Salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah studi literatur di mana sumber resmi dilengkapi dengan informasi faktual dan otentik mengenai fenomena yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui analisis dokumen dan diperkuat dengan wawancara langsung. Bahan dan informasi yang digunakan diperoleh dari pengumpulan data studi kepustakaan yang diolah dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi (*Australian Aid* dan PWYP), serta berita terkini. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari PWYP Indonesia untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai implementasi program *We for JET*. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian diolah dan digabungkan untuk melengkapi serta memperjelas temuan dalam penelitian ini.

Dibutuhkan tentunya di dalam suatu penelitian sebuah ruang lingkup yang digunakan sebagai batasan dan fokus terhadap fenomena yang diteliti. Diperlukannya batasan dalam penelitian bertujuan untuk memudahkan akses peneliti dalam mencari sumber data, mengelola, dan menganalisis data dengan teori penelitian yang telah ditentukan agar dapat diselesaikan secara maksimal dan tepat sasaran. Untuk memfokuskan dan memperjelas

⁶ Department of Foreign Affairs and Trade, "Global Themes," Department of Foreign Affairs and Trade, accessed December 13, 2025, <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/global-themes>.

⁷ Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan," 2005.

⁸ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Quantitative Research Method," *Quantitative Research Journal* 9, no. 2 (2009).

tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada analisis kerja sama PWYP Indonesia dan *Australian Aid* dalam program *We for JET* yang dilaksanakan di wilayah dampingan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN **Sejarah *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid***

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan bagian dari koalisi global masyarakat sipil yang pertama kali dideklarasikan secara internasional pada tahun 2002. PWYP Indonesia berdiri pada tanggal 21 November 2007 melalui Lokakarya Nasional tentang Transparansi Keuangan Sektor Migas dan Pertambangan di Jakarta, sebagai bentuk dari semangat reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif. PWYP Indonesia secara resmi memperoleh status badan hukum di Indonesia pada tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif, berdasarkan nomor registrasi AHU-AH.01.06-0032012. PWYP Indonesia ini dibentuk sebagai organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam ekstraktif, seperti minyak, gas, dan mineral di Indonesia.⁹

Tujuan utama dari pembentukan PWYP Indonesia adalah untuk mengatasi kerentanan dalam pengelolaan pendapatan sektor ekstraktif terhadap praktik korupsi,

kebocoran anggaran, serta ketimpangan sosial yang merugikan rakyat. Organisasi ini memposisikan diri sebagai jembatan yang menutup kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri energi. Melalui pendekatan advokasi berbasis bukti dan kolaborasi multipihak, PWYP Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap sen pendapatan dari kekayaan alam dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.¹⁰

Australian Aid merupakan program bantuan luar negeri resmi Pemerintah Australia yang secara historis berakar dari pembentukan lembaga bantuan pada tahun 1974. Pada awalnya, program bantuan ini dikelola oleh sebuah lembaga independen yang dikenal sebagai *Australian Agency for International Development* atau *AusAID*.¹¹ Pembentukan lembaga khusus ini menandai komitmen serius Pemerintah Australia untuk memiliki institusi profesional yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi bantuan pembangunan internasional secara terstruktur, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Selama periode tahun 1980-an hingga 2000-an, *AusAID* tumbuh menjadi aktor utama yang memperkuat posisi Australia sebagai mitra pembangunan strategis di Asia Tenggara dan Pasifik. Lembaga ini mengelola berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan tata kelola

⁹ Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, "Profil Organisasi," Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, accessed May 25, 2025, <https://pwyvindonesia.org/id/profil-organisasi/>.

¹⁰ Indonesia, "Profil Organisasi," n.d.

¹¹ Kristin Westad, "Sejarah Program Bantuan Luar Negeri Australia," The Borgen Project, 2017.

pemerintahan dan pemberdayaan perempuan di berbagai negara mitra. Seiring dengan dinamika global yang berkembang, *AusAID* mulai mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis hasil (*results-based development*) guna memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari setiap investasi bantuan yang diberikan.¹²

Perubahan signifikan terjadi pada kurun waktu 2013-2014, di mana Pemerintah Australia memutuskan untuk mengintegrasikan *AusAID* secara penuh ke dalam *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT).¹³ Sejak integrasi tersebut, *Australian Aid* tidak lagi berdiri sebagai lembaga independen, melainkan menjadi instrumen langsung dari kebijakan luar negeri Australia untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang stabil dan inklusif. Transformasi ini bertujuan agar bantuan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kepentingan strategis Australia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Indo-Pasifik.

Program *We for JET Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia

Program *We for JET* merupakan wujud nyata komitmen *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia terhadap kesetaraan gender dalam tata kelola energi. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa proses transisi energi di Indonesia tidak hanya menjadi agenda teknokratis yang

kaku, tetapi juga menjadi agenda sosial yang mengedepankan inklusi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. Melalui inisiatif ini, PWYP Indonesia berupaya memperkuat peran perempuan agar dapat memimpin dan mendapatkan manfaat langsung dari peralihan energi bersih.¹⁴

Pelaksanaan program *We for JET* didukung secara finansial oleh *Australian Aid*, yang memiliki keselarasan strategi pembangunan dalam menempatkan kesetaraan gender sebagai pilar utama. Kerja sama ini memungkinkan PWYP Indonesia untuk memperluas ruang partisipasi publik melalui berbagai kegiatan kampanye narasi perempuan, mulai dari forum diskusi digital di media sosial hingga kegiatan turun kelapangan.¹⁵

Latar Belakang Kerja Sama PWYP Indonesia dan Australian Aid

Latar belakang kerja sama antara *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid* didasarkan pada kesamaan visi dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel di Indonesia. PWYP Indonesia, sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil global, memiliki fokus pada advokasi transparansi sektor ekstraktif, sedangkan *Australian Aid* melalui DFAT memiliki misi untuk mendukung pembangunan manusia dan penguatan institusi publik di negara mitra. Sinergi ini memungkinkan

¹² Department of Foreign Affairs and Trade, "Celebrating 40 Years Of Australian Aid," *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), 2014.

¹³ Department of Foreign Affairs and Trade, "Annual Report 2013–14: Departmental Overview," Government of Australia., 2014.

¹⁴ Indonesia, "Introducing You Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)."

¹⁵ "Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025," n.d.

kedua aktor untuk berkolaborasi dalam isu-isu strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.¹⁶

Australian Aid memberikan perhatian khusus pada isu inklusi sosial dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar utama dalam strategi pembangunannya. Di sisi lain, PWYP Indonesia melihat adanya ketimpangan gender dalam sektor energi, di mana perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh krisis energi namun memiliki ruang partisipasi yang sangat terbatas dalam pengambilan keputusan. Kesamaan perhatian terhadap isu GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) ini memperkuat alasan kedua belah pihak untuk menjalin kemitraan.¹⁷

Melalui kemitraan ini, inisiatif seperti program *We for JET (Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition)* yang menjadi bukti konkret dari latar belakang kerja sama tersebut. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek dalam kebijakan energi, tetapi juga menjadi pemimpin yang mendapatkan manfaat dari peralihan energi bersih.¹⁸

¹⁶ Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028," 2024, 44, <https://www.dfat.gov.au/publications>.

¹⁷ Department of Foreign Affairs and Trade, *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy*, Department of Foreign Affairs and Trade, 2016, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/gender-equality-and-womens-empowerment-strategy.pdf>.

¹⁸ PWYP Indonesia, "Tentang Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)," PWYP Indonesia, 2024, <https://pwypindonesia.org/id/kepemimpinan-dan-penguatan-perempuan-dan-kelompok>

Bentuk Perjanjian dan Kerangka Kerja Sama dengan Australian Aid Serta Posisi PWYP Indonesia Sebagai CSO Nasional

Secara formal melalui Australia Indonesia *Development Partnership Plan* (DPP) 2024-2028 yang berfungsi sebagai payung utama hubungan bilateral di bidang pembangunan. Dokumen ini menetapkan prinsip, prioritas, dan pendekatan kerja sama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen teknis seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), *Program Implementation Agreements*, *Activity Agreements*, hingga *grant agreements* dengan mitra pelaksana, termasuk organisasi masyarakat sipil.¹⁹ DPP 2024-2028 juga menegaskan komitmen Australia terhadap pendekatan *locally led development*, yaitu pembangunan yang dirancang dan dikelola bersama aktor lokal agar program lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰

Sruktur perjanjian tersebut, MoU menjadi dasar hukum dan politik tertinggi yang mengatur ruang lingkup kerja sama lintas sektor, seperti tata kelola, energi, perubahan iklim, dan pemberdayaan masyarakat. MoU kemudian dijabarkan ke dalam perjanjian teknis yang mengatur pembagian peran, alur pendanaan, kewajiban pelaporan, serta mekanisme koordinasi antarlembaga.²¹ Melalui

rentan-dalam-transisi-energi-yang-transformatif-dan-berkeadilan-di-indonesia/.

¹⁹ Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028."

²⁰ Department of Foreign Affairs and Trade.

²¹ Kedutaan Besar Australia and Indonesia, "MOU Antara Otoritas Ibu Kota Nusantara Dan Otoritas Ibu Kota Australia," Kedutaan

DPP 2024-2028, Australia menekankan bahwa seluruh kerja sama pembangunan harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengukuran kinerja berbasis hasil sebagai standar utama tata kelola bantuan.

Pada tingkat implementasi, *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) menggunakan *grant agreements* sebagai instrumen utama dalam bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Perjanjian ini berfungsi sebagai kontrak legal yang mengatur penggunaan dana, indikator hasil, pelaporan keuangan, serta mekanisme audit dan evaluasi.²² Untuk program multi-tahun, *Performance Assessment Framework* (PAF) diterapkan sebagai alat ukur kinerja yang mencakup indikator, metode evaluasi, dan siklus peninjauan berkala.²³

Dalam konteks tersebut, PWYP Indonesia berada pada posisi yang relevan sebagai mitra *Australian Aid* karena mandat dan kapasitasnya sejalan dengan prioritas pembangunan Australia. DPP 2024-2028 menempatkan organisasi masyarakat sipil sebagai aktor strategis dalam tata kelola, advokasi publik, dan pemantauan kebijakan. Fokus PWYP Indonesia pada transparansi industri ekstraktif,

keterbukaan anggaran sumber daya alam, serta keadilan energi selaras dengan agenda *inclusive governance* dan penguatan institusi yang menjadi pilar utama *Australian Aid*. Keselarasan ini semakin diperkuat oleh komitmen PWYP Indonesia terhadap isu energi bersih dan transisi energi berkeadilan.²⁴

Dalam perspektif *governance network* dan *multi-level governance*, hubungan antara PWYP Indonesia dan *Australian Aid* mencerminkan interaksi saling melengkapi antara aktor negara dan non-negara. *Australian Aid* menyediakan sumber daya finansial dan mandat pembangunan, sementara PWYP Indonesia menghadirkan legitimasi lokal, data lapangan, serta kapasitas advokasi dan akuntabilitas sosial. Relasi ini tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga transnasional, karena PWYP Indonesia membawa standar tata kelola global melalui jejaring internasionalnya.²⁵

Mekanisme Pendanaan *Australian Aid*

Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan organisasi non-pemerintah (NGO), baik lokal maupun internasional, merupakan elemen penting dalam model kerja *Australian Aid*. Pemerintah Australia memandang CSO sebagai aktor strategis dalam menjangkau kelompok rentan, memperkuat partisipasi publik, serta

Besar Australia Indonesia, 2024, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM24_014.html.

²² Department of Foreign Affairs and Trade, “Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028.”

²³ Department of Foreign Affairs and Trade, “Australia’s Development Program — Performance Assessment,” Department of Foreign Affairs and Trade, accessed December 13, 2025, <https://www.dfat.gov.au/development/performance-assessment>.

²⁴ Department of Foreign Affairs and Trade, “Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028.”

²⁵ Asia Society Policy Institute, “Australian Aid,” Asia Society Policy Institute, accessed December 13, 2025, <https://asiasociety.org/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/stakeholders/multilateral-and-third-country-institutions-and-agencies/third-country-aid-agencies/australian-aid>.

mengawasi kebijakan pemerintah. Melalui kemitraan ini, *Australian Aid* tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan, tetapi juga memperkuat kapasitas CSO lokal agar mampu menjalankan fungsi advokasi, inklusi sosial, dan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

Mekanisme pendanaan kerja sama pembangunan Australia-Indonesia diatur dalam *Australia-Indonesia Development Partnership Plan* (DPP) 2024-2028 yang membagi skema pembiayaan ke dalam dua jalur utama, yaitu *Official Development Assistance* (ODA) dan investasi non-ODA. ODA digunakan untuk mendukung penguatan institusi, tata kelola, dan program sosial, sedangkan non-ODA difokuskan pada transformasi ekonomi, energi, dan iklim. DFAT mengelola pendanaan melalui country program budget yang dirancang dalam siklus multi-tahun, sehingga setiap investasi harus selaras dengan prioritas strategis, kerangka hasil, dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan.²⁶

Pendanaan *Australian Aid* disalurkan melalui berbagai instrumen, salah satunya *grant agreements* yang diberikan langsung kepada kementerian, lembaga, universitas, maupun CSO. Dalam skema hibah kepada CSO seperti PWYP Indonesia, perjanjian pendanaan mengatur secara rinci besaran dana, rencana kerja, indikator kinerja, serta kewajiban pelaporan dan audit independen. Hibah bersifat *performance-based*, di mana pencairan dana dilakukan secara

bertahap berdasarkan capaian output dan kepatuhan administratif, sehingga memastikan penggunaan dana publik Australia berlangsung secara akuntabel.²⁷

Bukan hanya hibah, DFAT juga menggunakan *Program Implementation Agreements* (PIA) sebagai kontrak teknis dengan pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan program tertentu, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti *blended finance* dan *Australian Development Investments* (ADI). PIA mengatur dukungan anggaran dan kegiatan teknis seperti pelatihan, riset kebijakan, dan penguatan sistem layanan publik, sementara ADI memadukan dana publik dengan investasi swasta untuk mendukung energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan agenda transisi energi. Instrumen ini memungkinkan Australia memperluas dampak pembangunan sekaligus membagi risiko finansial dengan sektor non-negara.²⁸

Seluruh mekanisme pendanaan *Australian Aid* berlandaskan prinsip *value for money* yang menekankan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan. Penyaluran dana dilakukan melalui sistem *tranche-based disbursement* yang mensyaratkan laporan kemajuan, laporan keuangan, audit independen, serta evaluasi berkala.²⁹ Dalam konteks kerja sama dengan CSO seperti PWYP Indonesia, mekanisme ini memastikan bahwa pendanaan digunakan untuk kegiatan yang selaras dengan mandat organisasi, seperti riset kebijakan sumber daya

²⁷ *Ibid*

²⁸ Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028."

²⁹ *Ibid*

²⁶ Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028."

alam, advokasi publik, pengawasan anggaran, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan **Dampak Kerja Sama *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dan Australian Aid dalam Mendorong Pemberdayaan Perempuan**

Transisi energi menjadi agenda strategis Indonesia dalam merespons krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil. Proses peralihan menuju energi bersih tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur dan investasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia melalui program *We for JET* mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan dalam transisi energi dengan dukungan pendanaan dari *Australian Aid*. Program ini berangkat dari kesadaran bahwa transisi energi yang berkelanjutan harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.³⁰ PWYP Indonesia memandang perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan energi, namun sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menjadi dasar normatif dan ideologis pembentukan program *We for JET*. Program ini dirancang untuk memperkuat peran perempuan dalam memahami, mengadvokasi, dan berpartisipasi langsung dalam proses transisi energi. Strategi *We for JET* dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional, dengan

³⁰ “Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025.”

wilayah fokus di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.³¹

Salah satu strategi utama *We for JET* adalah membangun kesadaran publik dan pengetahuan masyarakat mengenai transisi energi berkeadilan. PWYP Indonesia melakukan kampanye melalui berbagai media, seperti webinar, diskusi publik, dan media sosial yang secara khusus melibatkan perempuan. Strategi ini bertujuan memperkenalkan konsep *Just Energy Transition* serta memperluas pemahaman bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan kebijakan energi.³²

Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan yang dilakukan mencakup kepemimpinan perempuan, analisis kebijakan energi, serta pengelolaan sumber daya energi berbasis komunitas. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan diri perempuan agar mampu menyuarakan aspirasi dalam forum kebijakan. PWYP juga menerapkan prinsip inklusivitas dengan memastikan keterlibatan minimal 30 persen peserta perempuan serta melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap kegiatan.³³

Pendekatan *We for JET* bersifat *bottom-up*, di mana proses dimulai dari tingkat desa sebelum diangkat ke level nasional. Di tingkat desa, PWYP Indonesia menyelenggarakan edukasi masyarakat melalui lokakarya dan diskusi partisipatif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan komunitas adat. Selain

³¹ Indonesia, “Tentang Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (*We for JET*).”

³² *Ibid*

³³ “Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025.”

itu, PWYP mengembangkan inisiatif ekonomi energi terbarukan berbasis komunitas, seperti pendampingan kelompok perempuan di Desa Bantala, Nusa Tenggara Timur, dalam produksi briket kelapa dan pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi rumah tangga.³⁴

Pada level kabupaten dan provinsi, strategi PWYP diarahkan pada advokasi kebijakan dan penguatan kelembagaan dengan mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) dalam kebijakan energi daerah.³⁵ PWYP bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendorong penyusunan dan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) agar kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga menjamin akses yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan. Hasil kajian lapangan kemudian disampaikan melalui audiensi dan forum diskusi dengan pemerintah daerah.

Di tingkat nasional, PWYP Indonesia menerapkan advokasi kebijakan berbasis bukti melalui riset, penyusunan rekomendasi, serta penguatan narasi publik tentang keadilan transisi energi. PWYP mendorong agar kebijakan nasional, termasuk *Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dalam kerangka JETP*, memasukkan indikator gender dan partisipasi publik. Melalui kegiatan kampanye,

produksi konten, dan kolaborasi dengan media, PWYP memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan dalam transisi energi, sekaligus memastikan bahwa suara komunitas lokal turut memengaruhi arah kebijakan energi nasional

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Program *We for JET* oleh PWYP Indonesia

PWYP Indonesia sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi transisi energi berbasis keadilan gender melalui program *We for JET* masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, PWYP beroperasi di tengah kebijakan nasional yang masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis energi fosil, serta kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya memahami urgensi transisi energi.³⁶

Pada tingkat desa, tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep transisi energi berkeadilan. Banyak masyarakat di wilayah dampingan seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat masih memandang energi sebagai isu teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari, serta menganggap energi bersih hanya relevan bagi sektor industri. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan ekonomi masyarakat untuk mengelola infrastruktur energi terbarukan, seperti panel surya dan biogas, turut menghambat partisipasi aktif dalam program transisi energi berbasis komunitas.³⁷

³⁴ PWYP Indonesia, “Transisi Energi Inklusif Di Tangan Perempuan Desa Nusa Tenggara,” PWYP Indonesia, 2025, <https://pwypindonesia.org/id/transisi-energi-inklusif-di-tangan-perempuan-desa-nusa-tenggara/>.

³⁵ Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, “Memahami Transisi Energi Berkeadilan Dan Pengarusutamaan GEDSI,” PWYP Indonesia, 2024.

³⁶ “Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025.”

³⁷ “Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025.”

Tantangan berikutnya muncul pada level kebijakan, khususnya dalam integrasi prinsip *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) dalam kebijakan energi. Meskipun agenda transisi energi mulai mendapat perhatian pemerintah, banyak regulasi energi di tingkat nasional dan daerah belum secara eksplisit memasukkan indikator gender, partisipasi perempuan, dan dampak sosial. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara kementerian teknis dan lembaga yang menangani isu gender masih lemah, sehingga menciptakan celah kebijakan yang menyulitkan implementasi transisi energi yang berkeadilan.³⁸

Dalam merespons berbagai tantangan tersebut, PWYP Indonesia mengembangkan solusi adaptif dan kolaboratif. Untuk meningkatkan literasi energi masyarakat desa, PWYP menerapkan pendekatan *community-based learning* melalui pelatihan partisipatif dan praktik langsung energi terbarukan, seperti pemanfaatan biomassa dan briket kelapa. Di tingkat kebijakan, PWYP memperkuat advokasi berbasis data melalui riset kolaboratif dengan lembaga akademik dan pemerintah, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan dalam forum-forum nasional.

PWYP juga mendorong penguatan partisipasi perempuan melalui strategi pelatihan kepemimpinan dan mentoring berbasis komunitas. Strategi ini bertujuan membentuk pemimpin perempuan lokal yang mampu menyuarakan kepentingan kelompoknya dalam proses kebijakan energi. PWYP juga

menginisiasi forum dialog multi-aktor untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta memperkuat kapasitas internal organisasi melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, PWYP berupaya memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan

D. KESIMPULAN

Kerja sama antara Publish *What You Pay* (PWYP) Indonesia dan *Australian Aid* melalui program *We for JET* merupakan bentuk nyata kolaborasi aktor non-negara dalam mendorong transisi energi yang inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia. Program ini berhasil mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan pemimpin yang mendapatkan manfaat nyata dari peralihan energi bersih. Melalui dukungan finansial dan strategis dari *Australian Aid*, PWYP Indonesia mampu memperkuat kapasitas perempuan di tingkat lokal, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, melalui edukasi, pelatihan kepemimpinan, hingga inisiatif ekonomi energi terbarukan berbasis komunitas.

Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi energi serta kebijakan nasional yang masih dominan pada energi fosil, kerja sama ini menawarkan solusi adaptif melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas. Sinergi ini menunjukkan bahwa hubungan transnasional antara lembaga bantuan internasional dan organisasi

³⁸ “Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025.”

masyarakat sipil nasional mampu menghasilkan dampak struktural dan normatif dalam tata kelola energi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Australia, Kedutaan Besar, and Indonesia. "MOU Antara Otoritas Ibu Kota Nusantara Dan Otoritas Ibu Kota Australia." Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2024. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM24_014.html.

Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Quantitative Research Method." *Quantitative Research Journal* 9, no. 2 (2009).

Department of Foreign Affairs and Trade. "Australia – Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028," 2024, 44. <https://www.dfat.gov.au/publications>.

Department of Foreign Affairs and Trade. *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy. Department of Foreign Affairs and Trade*, 2016. <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/gender-equality-and-womens-empowerment-strategy.pdf>.

Hiong, Cindy. "Krisis Iklim Meningkatkan Risiko Kekerasan Berbasis Gender." bincang perempuan, 2024. <https://bincangperempuan.com/krisis-iklim-meningkatkan-risiko-kekerasan-berbasis-gender/>.

Indonesia, Publish What You Pay. "Introducing You Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)." Publish What You Pay

Indonesia, n.d. <https://pwybindonesia.org/en/women-lead-and-benefited-from-a-just-energy-transition-we-for-jet/>.

Indonesia, Publish What You Pay. "Profil Organisasi." Publish What You Pay Indonesia, n.d. <https://pwybindonesia.org/id/profil-organisasi/>.

Indonesia, Publish What You Pay (PWYP). "Profil Organisasi." Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Accessed May 25, 2025. <https://pwybindonesia.org/id/profil-organisasi/>.

Indonesia, PWYP. "Tentang Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)." PWYP Indonesia, 2024. <https://pwybindonesia.org/id/kepemimpinan-dan-penguatan-perempuan-dan-kelompok-rentan-dalam-transisi-energi-yang-transformatif-dan-berkeadilan-di-indonesia/>.

Indonesia, Publish What You Pay. "Transisi Energi Inklusif Di Tangan Perempuan Desa Nusa Tenggara." PWYP Indonesia, 2025. <https://pwybindonesia.org/id/transisi-energi-inklusif-di-tangan-perempuan-desa-nusa-tenggara/>. Institute, Asia Society Policy. "Australian Aid." Asia Society Policy Institute. Accessed December 13, 2025. <https://asiasociety.org/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/stakeholders/multilateral-and-third-country-institutions-and-agencies/third-country-aid-agencies/australian-aid>.

Kristin Westad. "Sejarah Program Bantuan Luar Negeri Australia." The Borgen Project, 2017.

Pay, Publish What You, and Indonesia. "Women Lead and Benefited from a Just Energy Transition (We for JET)." Publish What You Pay Indonesia. Accessed May 25, 2025.

<https://pwypindonesia.org/en/>. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. "Memahami Transisi Energi Berkeadilan Dan Pengarusutamaan GEDSI." PWYP Indonesia, 2024.

Sireagar, Syahrul. "Menjaga Napas Bumi: Tantangan Dan Solusi Krisis Air, Kedaulatan Pangan, Dan Energi Di Era Perubahan Iklim." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024. <https://umj.ac.id/opini/menjaga-napas-bumi-tantangan-dan-solusi-krisis-air-kedaulatan-pangan-dan-energi-di-era-perubahan-iklim/>.

Suyanto, Bagong. "Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan," 2005.

Trade, Department of Foreign Affairs and. "Annual Report 2013–14: Departmental Overview." Government of Australia., 2014.

Trade, Department of Foreign Affairs and. "Australia's Development Program — Performance Assessment." Department of Foreign Affairs and Trade. Accessed December 13, 2025.

<https://www.dfat.gov.au/development/performance-assessment>. Trade, Department of Foreign Affairs and. "Celebrating 40 Years Of Australian Aid."

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2014.

Trade, Department of Foreign Affairs and. "Global Themes." Department of Foreign Affairs and Trade. Accessed December 13, 2025. <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/global-themes>.

"Wawancara Bersama Ketua Divisi Riset Dan Advokasi PWYP Indonesia Tanggal 24 Oktober 2025," n.d.